



Pekalongan  
World's City of Batik

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025

Dinas Perdagangan, Koperasi  
dan UKM Kota Pekalongan  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam kita panjatkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil hisab kelak.

Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dindagkop & UKM tahun 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja menjadi suatu keharusan karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaran pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan cuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi. Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dindagkop & UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal. Penyusunan Renja Tahun 2025 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Dindagkop & UKM  
Kota Pekalongan

**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Catatan Penting.....	71
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	72
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 .....	19
Tabel T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan .....	27
Tabel T.C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	33
Tabel T.C 32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	50
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional .....	52
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	59
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

---

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara lugas telah mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan

dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan ciri khas kearifan lokal dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Rentra Perangkat Daerah pada tahun n.
- b. Selanjutnya rencangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
- c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *bottom up, top down*, dan politis.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai salah satu OPD di Kota Pekalongan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan koperasi dan UKM kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 yaitu **“Terwujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. Terdapat 7 (tujuh) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelaanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa

- Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten

- Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Panghapusan Kemiskinan Ekstrim;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
  18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 77);
  19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
  20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
  21. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 71);
  22. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

**1. Maksud**

Dokumen Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Tujuan

Dokumen Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- g. Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

## **1.4 SISTEMATIKA**

---

Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dindagkop & UKM, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang.**

Memuat tentang pengertian Renja Dindagkop & UKM, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

## **1.2 Landasan Hukum.**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dindagkop & UKM Tahun 2025.

## **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dindagkop & UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dindagkop & UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Selain itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti SDG's. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besamya anggaran berbeda.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dindagkop & UKM.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.**

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dindagkop & UKM.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM.

#### **3.2 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan Rencana Kerja Kegiatan, Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, Pagu Program dan Kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

---

Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 18.277.826.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 17.522.869.802,- dengan capaian kinerja sebesar

79.59% dan capaian kinerja keuangan/anggaran sebesar 95.86%. Dengan realisasi belanja tersebut dapat dianalisa capaian target kinerja berdasarkan indikator berdasarkan urusan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.894.202.723,- atau sebesar 82.69%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 18.519.495.825,- melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai diatas 90%, baik realisasi keuangan/anggaran maupun capaian fisiknya dan realisasi pendapatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pada kegiatan hibah dari bantuan sosial dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dalam memahami Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Nomor 02A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga hal tersebut berakibat pada ketidaksesuaian dengan perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki program dan kegiatan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap beberapa rekening belanja.
3. Koordinasi antar stake holder sektor perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah yang kurang optimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan;

4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
5. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
6. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu singkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dindagkop & UKM dalam pelaksanaan urusan perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu urusan Perdagangan dan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dengan 12 program.

Adapun evaluasi kinerja hasil/keluaran program/kegiatan/subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 5 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023. Adapun untuk melihat capaian kinerja secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan tahun 2023 terdapat 7 indikator program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Renja tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target capaian kinerja.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Indikator program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai targetnya

Terdapat 5 indikator program yang tidak sesuai pencapaian dalam target kinerjanya antara lain program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya hambatan dalam komunikasi dan koordinasi dengan pengurus koperasi.
- b. Pembangunan pasar kecamatan masih dalam tahap perencanaan pada tahun 2023, sedangkan pembangunan fisik direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- c. Adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor ditambah perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.
- d. Tingkat kesadaran wajib tera dan tera ulang yang masih rendah serta belum terdapat sanksi yang diberlakukan dengan tegas bagi wajib tera atau tera ulang yang tidak melaksanakan tera / terang alat UTTP.
- e. Masih kurangnya fasilitasi yang diberikan kepada UMKM terutama dalam pelaksanaan pameran luar daerah dan waktu pelaksanaan pameran/event sepenuhnya menjadi wewenang penyelenggara. Selain itu, fasilitasi pemasaran yang diberikan kepada UMKM dalam

Showroom Dekranasda tergantung pada minat UMKM untuk melakukan pemasaran di Showroom Dekranasda.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang membatasi jumlah indikator pada setiap subkegiatan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dindagkop & UKM Kota Pekalongan yang sudah dilakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023  
KOTA PEKALONGAN**

**OPD : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33,23	29,70	30,94	29,70	29,70	89,38	Belum Tercapai
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59,68	58,31	97,20	58,31	58,31	97,70	Belum Tercapai
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12,37	11,38	12,06	11,38	11,38	92,00	Belum Tercapai
5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome))	Persen	77,70	81,07	75,42	81,07	81,07	104,34	Melebihi Target
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100	68,75	93,75	68,75	68,75	68,75	Belum Tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100,00	100	88	100	100	100,00	Tercapai
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8,19	-0,46	7,6	-0,46	7,6	-5,62	Belum Tercapai
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83,99	59,02	77,99	59,02	59,02	70,27	Belum Tercapai
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7,50	0,96	4,26	0,96	0,96	12,80	Belum Tercapai
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

### **1. Tugas dan Fungsi Dindagkop & UKM**

Tugas dan fungsi Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah:

#### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dindagkop & UKM Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

#### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 2) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perdagangan;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 7) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan

evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- 8) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaantugas;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dindagkop & UKM berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dindagkop & UKM Kota Pekalongan, sampai dengan Juli 2024 berjumlah 60 orang.

- a. Jumlah pegawai Dindagkop & UKM berdasarkan jenjang pendidikan terakhir daripegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut:
  - 1) 7 (tujuh) orang berpendidikan S 2;
  - 2) 15 (lima belas) orang berpendidikan S 1/D IV;
  - 3) 1 (satu) orang berpendidikan D III;
  - 4) 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan setingkat SMA;

- 5) 8 (delapan) orang berpendidikan setingkat SMP;
- 6) 7 (tujuh) orang berpendidikan setingkat SD
- b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
- 1) Struktural
    - a) Eselon II.b : 1 orang
    - b) Eselon III.a : 1 orang
    - c) Eselon III.b : 3 orang
    - d) Eselon IV.a : 3 orang
    - e) Eselon IV.b : 1 orang
  - 2) Pejabat Fungsional : 7 orang
  - 3) Staf : 44 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:
- 1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - 2) Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang
  - 3) Pembina (IV/a) : 7 orang
  - 4) Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
  - 5) Penata (III/c) : 2 orang
  - 6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
  - 7) Penata Muda (III/a) : 19 orang
  - 8) Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
  - 9) Pengatur (II/c) : 9 orang
  - 10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 3 orang
  - 11) Pengatur Muda (II/a) : 9 orang
  - 12) Juru Tingkat I (I/d) : 1 orang
  - 13) PPPK/ Gol IX : 1 orang

#### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dindagkop & UKM Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:

a.	Mobil Dinas	:	4	unit
b.	Motor Dinas	:	25	unit
c.	Dump Truk	:	6	unit
d.	Kendaraan Roda Tiga lainnya	:	6	unit
e.	Container	:	2	unit
f.	Gerobak	:	59	unit
g.	Genset	:	2	unit
h.	Pompa Air	:	8	unit
i.	Mesin ketik	:	5	unit
j.	Lemari Kas	:	1	unit
k.	Lemari Besi	:	14	unit
l.	Lemari Kayu	:	14	unit
m.	Rak Besi	:	4	unit
n.	Filling Cabinet Besi	:	20	unit
o.	Brankas	:	1	unit
p.	Lemari Kaca	:	27	unit
q.	Lemari Makan	:	1	unit
r.	CCTV	:	2	unit
s.	Papan Visual	:	2	unit
t.	White Board	:	1	unit
u.	Mesin Presensi	:	16	unit
v.	Display	:	3	unit
w.	LCD	:	4	unit
x.	Papan Nama Instansi	:	5	unit
y.	Papan Pengumuman	:	3	unit
z.	Papan Tulis	:	1	unit
aa.	Alat Kantor Lainnya	:	17	unit
ab.	Meja Kerja Kayu	:	4	unit
ac.	Kursi Besi/Metal	:	13	unit
ad.	Bangku Panjang Besi/Metal	:	56	unit
ae.	Meja Rapat	:	19	unit
af.	Meja Ketik	:	1	unit
ag.	Meja Resepsionis	:	1	unit
ah.	Meja Makan Besi	:	68	unit
ai.	Kursi Rapat	:	180	unit
aj.	Kursi Tamu	:	2	unit
ak.	Meja Komputer	:	1	unit
al.	Sofa	:	2	unit
am.	Meja Tulis	:	4	unit
an.	Mesin Pemotong Rumput	:	2	unit
ao.	Lemari Es	:	2	unit
ap.	A.C Window	:	35	unit

aq.	A.C Split	:	4	unit
ar.	Kipas Angin	:	7	unit
as.	Kompor Gas	:	2	unit
at.	PC. Unit	:	41	unit
au.	Harddisk eksternal dan sejenisnya	:	10	unit
av.	Scanner	:	3	unit
aw.	Server	:	1	unit
ax.	Monitor	:	2	unit
ay.	Printer	:	51	unit
az.	Laptop/notebook	:	26	unit
ba.	TV	:	8	unit
bb.	Amplifier	:	1	unit
bc.	Wireless	:	6	unit
bd.	Sound System	:	4	unit
be.	Megaphone	:	4	unit
bf.	Microphone	:	5	unit
bg.	Camera	:	21	unit
bh.	Tangga Alumunium	:	1	unit
bi.	Dispenser	:	2	unit
bj.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	:	10	unit
bk.	Alat Pemadam	:	12	unit
bl.	Meja Kerja	:	42	unit
bm.	Meja Tamu	:	4	unit
bn.	Meja Rapat	:	6	unit
bo.	Kursi Kerja	:	29	unit
bp.	Lemari Buku Arsip	:	16	unit
bq.	Alat Komunikasi Radio/Telphone	:	5	unit
br.	Tenda	:	3	unit
bs.	Ruang Kerja	:	11	ruang
bt.	Ruang Rapat	:	2	ruang
bu.	Gudang	:	1	ruang
bv.	Peralatan Tera	:	365	buah

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar 88,69 (A) atau predikat sangat baik. Dan pada tahun 2024 naik cukup tinggi menjadi sebesar 99,62 (A) atau predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pelayanan Masyarakat yang antara lain; pelayanan perpanjangan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pasar, pengajuan rekomendasai subsidi bahan bakar, pelayanan tera/ tera ulang, pembinaan UMKM dan koperasi dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan nilai evaluasi AKIP Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 84,55 (A) dengan

predikat memuaskan dan pada tahun 2023 mengalami tren kenaikan menjadi sebesar 85,45 (A) dengan predikat memuaskan; Evaluasi AKIP menggambarkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan capaian target kinerja dalam organisasi. Nilai 85,45 menunjukan bahwa Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerjanya telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas antara lain;

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi (Sitantri)
- b. Optimalisasi E-kinerja dan E-presensi
- c. Penggunaan Casecading dan pelaporan kinerja triwulan
- d. Pengaduan pelayanan masyarakat melalui akun sosial media di [@dindagkopukm.kotapekalongan, https://dindagkop.pekalongan.kota.go.id, www.facebook.com/dindagkopukmkotapekalongan.](https://dindagkop.pekalongan.kota.go.id)

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat sebagaimana tabel Tabel.T.C.30.

**Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)*	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)			Rp.8,12 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	Rp.11,54 Trilyun	Rp. 10,23 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	
2	Nilai Ekspor Perdagangan			26,71 Juta US\$	26,97 Juta US\$	27,24 Juta US\$	27,51 Juta US\$	11,09 Juta US\$	5,96 US\$	27,24 Juta US\$	27,51 Juta US\$	
3	Nilai Evaluasi AKIP			85,50	86,5	87,5	88,50	85,45	n/a	87,5	88,50	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76,78	77,08	77,38	77,68	88,69	77,08	77,38	77,68	
5	Prosentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			3,84 persen	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	n/a	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	
6	Persentase koperasi berkualitas			30,94 persen	31,49 persen	32,36 persen	33,23 persen	29,70 persen	20,66	32,36 persen	33,23 persen	
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			58,31 persen	58,77 persen	59,22 persen	59,68 persen	97,20 persen	35,01 persen	59,22 persen	0**	
8	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			12,06 persen	12,16 persen	12,27 persen	12,37 persen	23,09 persen	23,71 persen	12,27 persen	12,37 persen	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)*	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
9	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko)			75,42 persen	76,17 persen	76,92 persen	77,70 persen	81,07 persen	82,59 persen	76,92 persen	77,70 persen	
10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya			81,25 persen	93,75 persen	100 pesen	100 persen	68,75 persen	75,00 persen	100 pesen	100 persen	
11	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			54,55 persen	72,73 persen	90,91 persen	100 persen	100 persen	100 persen	90,91 persen	100 persen	
12	Persentase peningkatan volume ekspor			7,6 persen	7,79 persen	7,99 persen	8,19 persen	-0,04 persen	3,47 persen	7,99 persen	8,19 persen	
13	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			77,99 persen	79,99 persen	81,99 persen	83,99 persen	59,02 persen	43,51 persen	81,99 persen	83,99 persen	
14	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya			4,26 persen	5,24 persen	6,42 persen	7,5 persen	0,96 persen	0,63 persen	6,42 persen	7,5 persen	
15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	36,58 persen	100 persen	100 persen	

\*Data capaian merupakan Data sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

\*\* Rencana Tahun 2025, Dana DAK tidak akan dialokasikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

---

Dindagkop & UKM sebagai perangkat teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Permasalahan-permasalahan umum yang ada di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah secara singkat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Koperasi dan UMKM**

- a. Lemahnya kualitas tata kelola dan ekosistem kelembagaan perkoperasian dan UMKM di bidang manajemen termasuk sumber daya manusia (SDM), teknologi, permodalan dan pemasaran.
- b. Belum optimalnya penguatan usaha simpan-pinjam koperasi melalui penguatan pengawasan dan penguatan koperasi sektor riil.
- c. Lemahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan perlindungan kepada anggota.
- e. Masih rendahnya tingkat keberlanjutan (eksistensi) dan ketahanan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi.
- f. Isu kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang perlu digali penyelesaiannya ketika jumlah UMKM sektor kuliner yang ternyata memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Selain itu nilai modal usaha UMKM dari koperasi dan kontribusi peran gender dalam perkoperasian di Kota Pekalongan perlu digali dan dikembangkan.

- g. Masih lemahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi standardisasi produk di pasar domestik maupun global.
- h. Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital.
- i. Kurangnya akses pembiayaan terhadap UMKM disebabkan banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital.
- j. Regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal dan memakan waktu.

## 2. Perdagangan

- a. Lemahnya koordinasi antara sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok terutama minyak goreng, cabe, kedelai yang berdampak pada tingkat laju inflasi harus dikendalikan dan dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan sektor serta langkah-langkah taktis pengendalian harga.
- c. Kurang optimalnya pengembangan pasar dengan pola jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha dalam pengembangan pasar dalam negeri.
- d. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap peraturan perundangan perlindungan konsumen dan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatanya).
- e. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha produk unggulan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan bisnis internasional.Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Pasar dan Pedagangan Kaki Lima
  - a. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebagai ikon dan pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan.
  - b. Masih kurang optimalnya kondisi bangunan gedung dan sarana prasarana pada pasar Banyurip dalam menunjang aktivitas usaha perdagangan pasar tradisional.
  - c. Masih kurang optimalnya pendapatan retrbusi yang bersumber dari Pasar dan PK-5 dalam memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
  - d. Adanya PK-5 yang masih melakukan aktivitas berjualan di badan jalan serta kurangnya kesadaran terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan.
  - e. Keberadaan pusat fashion dan kuliner Sugihwaras yang belum digunakan secara maksimal oleh PK-5.
  - f. Kurangnya kesadaran para pedagang yang masih berjualan di Alun-alun Kota Pekalongan terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang ada.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dariproses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu, program dan kegiatan. Penyesuaian Rancangan awal RKPD terhadap Renja tahun 2025 tersebut melihat urgensi dan target indikator kinerja organisasi. Rancangan awal RKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 26.948.794.000,- menjadi Rp.20.301.719.000,- yang terdapat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Penyesuaian terjadi pada seluruh program yang ada pada Dindagkop & UKM, namun secara khusus program pendidikan dan latihan perkoperasian yang merupakan program bersumber dari dana DAK non fisik pada tahun 2025 ini tidak dialokasi oleh Instansi Pembina Pemerintah Pusat kepada Kota/Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T.C. 31.

**Tabel T.C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pekalongan	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	141.138	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pekalongan	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	61.780
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	141.138	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	61.780
3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	141.138	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	61.780

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,22 persen	645.601	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,18 persen	645.601	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 UMKM	645.601	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0	000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	1.218.262	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323.520

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
8	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	1.218.262	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	323.520
9	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	186 UMKM	1.218.262	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	47 UMKM	323.520
10	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko (IKK Outcome)	76,93%	17.700	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93%	6.330
11	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	9.300	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	4.530

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
12	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	9.300	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4.530
13	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	8.400	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	1.800
14	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	8.400	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.800
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	10.141.715	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	8.682.729

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
16	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	9.919.207	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	8.633.379
17	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2.427.510	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.500.000
18	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.491.697	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.133.379
19	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	222.508	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	49.350
20	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	222.508	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	49.350

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
21	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	96 persen	121.853	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	96 persen	102.690
22	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	113.338	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	96.470
23	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	113.338	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	96.470
24	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	8.515	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	6.220

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	8.515	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	6.220
26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Percentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	130.976	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Percentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	98.970
27	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	130.976	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	98.970
28	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	130.976	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	98.970

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
29	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	351.184	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	279.022	
30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	351.184	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	279.022	
31	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5038 UTTP	306.184	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5164 UTTP	254.112	
32	Pengawasan/Penyuluhuan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang	45.000	Pengawasan/Penyuluhuan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	24.910	
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	1.095.733	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	969.080	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
34	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	1.095.733	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	969.080
35	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	128 UMKM	983.383	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	872.330
36	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	112.350	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	96.750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	7.697.044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	7.014.252
38	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	24.102	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.084
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.176	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.132
40	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.476	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.952
41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	18.450	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	7.672.942	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.996.168
43	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	7.603.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	6.926.650
44	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	4.833.912	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.152.135
47	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500
48	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	9.500	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	9.500
49	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	670.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	633.441
50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.011
52	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	120.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000
53	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850
54	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000
55	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580
56	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
57	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.242.412	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.521.235
58	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	25.000
59	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.723.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.300
60	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.312	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.935
61	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	582.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	621.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
62	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000
63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	90.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000
64	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

---

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Wali Kota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai pihak/lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

**Tabel T.C-32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2025**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pengembangan UMKM</b>				
1.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1.1.a	Pengadaan Gerobak UMKM	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM terfasilitasi sarana pemasaran	21 UMKM	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

---

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja Dindagkop & UKM tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja Dindagkop & UKM Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024, Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

**Tabel. 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	<b>PN1</b> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	<b>PN2</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
3	<b>PN3</b> Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan Dan transportasi perkotaan, Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	<b>PN4</b> Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
5	<b>PN5</b> Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah diDalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	<b>PN6</b> Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	<b>PN7</b> Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment
8	<b>PN8</b> Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk "Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas". Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

**Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan  
Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>

Dari Penyelarasian Prioritas Nasional di atas, terdapat beberapa sasaran dan prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan sasaran kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pagan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (**PN2**);
2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (**PN3**);
3. Membangun Desa dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan (**PN6**).

Adapun kebijakan Pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah:

1. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.

2. Program Pembiayaan

Program pembiayaan dapat berupa fasilitasi pembiayaan modal dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### **3. Digitalisasi UMKM**

Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Digitasi UMKM dapat dilakukan dengan fasilitasi dan pembinaan melalui *e-marketplace* dan penggunaan katalog lokal.

### **4. Sinergi dan Koordinasi**

Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan Ekstrem mengamanatkan instansi yang membidangi urusan koperasi dan UKM untuk fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pendapatan keluarga miskin ekstrem.

## **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

---

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  - Sasaran :
    - a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
    - b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.
  - Sasaran :
    - a) Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan.
    - b) Meningkatnya nilai ekspor perdagangan.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Pada Rencana Kerja (Renja) Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :

#### **3.3.1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Bidang Koperasi Dan UMKM.**

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan kepada instansi yang membidangi koperasi dan UMKM dalam untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrim.

Angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 7% dan turun pada tahun 2023 menjadi 6,81%. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 317.524 jiwa yang merupakan penduduk dalam kategori miskin ekstrim sebanyak 25.498 jiwa.

### **3.3.2. Peningkatan Kesetaraan Dan Kesejahteraan Melalui Kebijakan Ramah Gender.**

Memperhatikan *cross cutting* Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang isu gender bahwasanya melalui kebijakan kesetaraan dan ramah gender serta pencapaian *inclusi* ekonomi dengan mendukung UMKM yang dikelola perempuan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM Kota Pekalongan sebanyak 23.951 UMKM sebanyak 21.05% dan mampu secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Dalam meningkatkan wirausaha Perempuan tersebut membutuhkan dukungan dan interfensi berupa pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur.

### **3.3.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ditunjukkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Renja PD tahun 2025 Terdapat 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.20.301.719.000, yang tersaji dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dindagkop & UKM**  
**Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN				20.301.719				18.521.127
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				385.300				2.209.866
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Kota Pekalongan	32,36 persen	61.780	DAU		33,23 persen	123.668
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota		64,46 persen	61.780	DAU		65,29 persen	123.668
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		100 unit usaha	61.780	DAU		100 koperasi	123.668
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0	000	-	Dana DAK Non Fisik PK2UMK tidak dialokasikan pada Tahun 2025	59,68 persen	667.649
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0	000	-		1,39 persen	667.649
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0	000	-		116 koperasi	667.649
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)		12,27 persen	323.520	DAU		12,37 Persen	1.418.549
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		6,06 persen	323.520	DAU		7,26 Persen	1.418.549
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		47 UMKM	323.520	DAU		90 UMKM	1.418.549

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capalan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				19.916.419				16.311.261
3.30.02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)		76,93%	6.330	DAU		77,70 persen	2.728
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		100 persen	4.530	DAU		100 persen	1.728
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6 Dokumen	4.530	DAU		3 Perizinan	1.728
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100 Persen	1.800	DAU		100 persen	1.000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		1 Dokumen	1.800	DAU		1 perijinan	1.000
03.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		100 persen	8.682.729	DAU		100 persen	6.050.840
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional		18,75 persen	8.633.379	DAU		18.75 persen	5.928.840
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit	1.500.000	DAU		0 Unit	000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12 Unit	7.133.379	DAU		16 Unit	5.928.840
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5		57,47 persen	49.350	DAU		68.9 7 Persen	122.000
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokumen	49.350	DAU		120 Orang	122.000
3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya		96 persen	102.960	DAU		100 persen	135.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok		90,91 persen	96.740	DAU		100 persen	130.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capalan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		18 Laporan	96.740	DAU		18 Laporan	130.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)		100 persen	6.220	DAU		100 persen	5.000
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		3 Dokumen	6.220	DAU		586 Dokumen	5.000
3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase peningkatan volume eksport</b>		7,99 persen	98.970	DAU		8,19 persen	117.849
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekspor (SIDa)		26 Pelaku Usaha	98.970	DAU		28 pelaku usaha	117.849
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		30 UMKM	98.970	DAU		30 UMKM	117.849
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Output)</b>		81,99 persen	279.022	DAU		83,99 persen	399.637
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)		81,99 persen	279.022	DAU		83.99 persen	399.637
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		5164 UTTP	254.112	DAU		5.290 UTTP	354.637
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100 Orang	24.910	DAU		5.164 UTTP	45.000
3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)</b>		6,42 persen	969.080	DAU		7,50 persen	421.031
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya		128 UMKM	969.080	DAU		100 persen	421.031
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		150 UMKM	872.330	DAU		12 UMKM	370.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capalan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		30 UMKM	96.750	DAU		12 UMKM	51.031
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capalan kinerja</b>		100 persen	7.014.252	DAU		100 persen	7.979.431
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	18.084	DAU		100 persen	22.850
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.132	DAU		2 Dokumen	2.750
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.952	DAU		2 Dokumen	1.650
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000	DAU		4 dokumen	18.450
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	6.996.168	DAU		100 persen	7.956.581
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/Bulan	6.926.650	DAU		14 bulan	7.881.731
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	67.800	DAU		12 bulan	73.200
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	1.718	DAU		1 dokumen	1.650
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		100 persen	2.763.076	DAU		100 persen	1.204.745
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	9.500	DAU		100 persen	14.500
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	9.500	DAU		2 kali	14.500
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	633.441	DAU		100 persen	317.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.000	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	196.011	DAU		12 bulan	47.500
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	85.850	DAU		12 bulan	64.950
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	67.000	DAU		12 bulan	60.000
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.580	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	272.000	DAU		55 org/kli	137.500
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	1.498.735	DAU		100 persen	518.053
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.500	DAU		12 bulan	2.400
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	979.300	DAU		12 bulan	415.240
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	516.935	DAU		12 bulan	100.413
3.30.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	621.400	DAU		100 Persen	354.742
3.30.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		44 Unit	465.000	DAU		36 Unit	304.742
3.30.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	130.000	DAU		2 Unit	30.000
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	26.400	DAU		12 Bulan	20.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Dindagkop & UKM Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dindagkop & UKM 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah memanfaatkan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya.

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dilakukan melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir.

Rencana kerja dan pendanaan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN</b>			20.301.719	
2.17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			385.300	
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	61.780	DAU
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	61.780	DAU
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	61.780	DAU
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000	-
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0	000	-
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323.520	DAU
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	323.520	DAU
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	47 UMKM	323.520	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			<b>19.916.419</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93%	6.330	DAU
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	4.530	DAU
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4.530	DAU
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	1.800	DAU
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.800	DAU
<b>03.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</b>	<b>100 persen</b>	<b>8.682.729</b>	<b>DAU</b>
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	8.633.379	DAU
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.500.000	DAU
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.133.379	DAU
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	49.350	DAU
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	49.350	DAU
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya</b>	<b>96 persen</b>	<b>102.960</b>	<b>DAU</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	96.740	DAU
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	96.740	DAU
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	6.220	DAU
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	6.220	DAU
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase peningkatan volume ekspor</b>	<b>7,99 persen</b>	<b>98.970</b>	<b>DAU</b>
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	98.970	DAU
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	98.970	DAU
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)</b>	<b>81,99 persen</b>	<b>279.022</b>	<b>DAU</b>
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	279.022	DAU
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5164 UTTP	254.112	DAU
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	24.910	DAU
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)</b>	<b>6,42 persen</b>	<b>969.080</b>	<b>DAU</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capalan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	969.080	DAU
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	872.330	DAU
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	96.750	DAU
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capalan kinerja</b>	100 persen	<b>7.014.252</b>	<b>DAU</b>
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.084	DAU
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.132	DAU
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.952	DAU
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000	DAU
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.996.168	DAU
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	6.926.650	DAU
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800	DAU
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718	DAU
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100 persen	<b>2.763.076</b>	<b>DAU</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500	DAU
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	9.500	DAU
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	633.441	DAU
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000	DAU
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.011	DAU
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000	DAU
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850	DAU
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000	DAU
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580	DAU
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000	DAU
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.498.735	DAU
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500	DAU
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.300	DAU
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.935	DAU
3.30.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	621.400	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000	DAU
3.30.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000	DAU
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400	DAU

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2025 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 12 (dua belas) Program, 18 (Delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rancangan Renja Dindagkop & Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, dan RENSTRA Dindagkop & UKM 2021-2026 serta dokumen perencanaan tahunan RKPD Kota Pekalongan tahun 2025. Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dindagkop & UKM Tahun 2025 memuat 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, yang terdiri dari 12 program 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.301.719.000,- ( dua puluh miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Substansi Renja Dindagkop & UKM disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan yang belum sempat dituntaskan pada pelaksanaan tahun anggaran 2024.

#### **5.1 CATATAN PENTING**

---

Dalam rangka pelaksanaan dan anggaran maka dipandang perlu memperhatikan ketersediaan anggaran dengan kesesuaian kebutuhan. Selain itu dalam hal pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

## **5.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

---

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan kefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Dindagkop & UKM disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dindagkop & UKM Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dindagkop & UKM, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Dindagkop & UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKMKota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
4. Dindagkop & UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

### **5.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

---

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Kami berharap, bahwa Renja Dindagkop & UKM ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 202 disusun, dibuat sebagai bahan usulan untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 1 Agustus 2024  
Kepala Dindagkop & UKM  
Kota Pekalongan

